

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Mengenai pengertian tentang anak di Indonesia, ada bermacam-macam pendapat yang memberikan definisi tentang anak. Seseorang yang dimasukkan dalam golongan anak adalah “Mereka yang belum dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik, yang masih belum dewasa), selain itu anak di sini meliputi anak sebagai pelaku, korban, pengamat atau saksi”.¹⁵

Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah manusia yang masih kecil.¹⁶ Sementara itu, Kertono memberikan pengertian anak sebagai keadaan manusia yang normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya. Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu yang belum dewasa serta belum kawin serta belum kawin. Sementara itu Soejono menyatakan bahwa anak menurut hukum adat adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik belum dewasa.¹⁷

Berdasarkan pengertian anak tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda

¹⁵Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal.50

¹⁶ WJ.S Poerwadarminta, 1991, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

¹⁷ Made Sadhi Astuti, 1997, *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Arena Hukum

usia dan sedang menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terkena pengaruh lingkungan sekitar. Pengertian anak juga dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:¹⁸

a. Pengertian Anak dari aspek Agama

Pengertian anak dalam pengertian agama sesuai dengan pandangan Islam yaitu titipan Allah SWT yang harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi Pendidikan, pengajaran, ketrampilan. Pengertian ini memberikan atau melahirkan hak-hak yang harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

b. Pengertian Anak dari aspek Sosiologi

Kedudukan anak dalam pengertian sosiologis memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Status sosial yang dimaksud ialah ditujukan pada kemampuan menerjemahkan ilmu dan teknologi sebagai ukuran interaksi yang dibentuk dari kemampuan berkomunikasi sosial yang berada pada skala paling rendah. Pengelompokan pengertian anak dalam makna sosial ini lebih mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspetasi sebagaimana orang dewasa.

¹⁸ Maulana Hasan Wdong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, hal 10.

2. Batasan Usia Anak

Batasan usia anak juga berbeda-beda. Berikut ini dapat dilihat beberapa pengertian anak dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pengertian mengenai anak dalam Undang-Undang ini dinyatakan dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menentukan:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan dewasa”.

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian mengenai anak dalam undang-undang ini dinyatakan dalam Pasal 45, menyatakan bahwa dalam memutuskan orang yang belum cukup umur (*minderjarigheid*) yang dituntut karena melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya ketika belum genap 16 (enam belas) tahun, maka hakim boleh memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau menghukum anak tersebut berupa pidana pokok yang dikurangi 1/3 (satu pertiga) yang tercantum dalam pasal 47. Dalam Pasal 46 disebutkan, jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka kemudian

anak tersebut dapat dimasukkan ke rumah pendidikan negara agar dapat menerima Pendidikan dari pemerintah atau diserahkan kepada Yayasan atau badan hukum yang bergerak di bidang Pendidikan atau tanggungan pemerintah. Kedua hal tersebut bersalah berusia 18 (delapan belas) tahun.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menentukan:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pengertian mengenai anak dalam Undang-Undang ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 yang Menentukan:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

d. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian mengenai anak dalam undang-undang ini dinyatakan dalam Pasal 1 yang menentukan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- e. Menurut Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

Pengertian mengenai anak dalam undang-undang ini dinyatakan dalam pasal 1 yang menentukan:

- f. *“Setiap manusia yang berusia 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat”*

Pengertian mengenai anak dalam undang-undang ini dinyatakan dalam pasal 1 yang menentukan:

“Setiap manusia yang berusia 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat”

jadi menurut konvensi hak anak ini anak dapat diartikan bahwa semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali undang-undang yang berlaku menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal daripada yang ditentukan oleh konvensi hak anak.

3. Hak-Hak Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa. Anak mempunyai berbagai hak yang harus implementasikan dalam

kehidupan dan penghidupan mereka. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut:

a. hak-hak anak dalam undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (pasal 2 sampai dengan 8)

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sudah melahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- 5) Dalam keadaan yang membahayakan, anak lah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan bantuan dan perlindungan.
- 6) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- 7) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- 8) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan pertumbuhan dan perkembangannya.
 - 9) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
 - 10) Anak berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan
 - 11) Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.
- b. Hak-hak adalah dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 66)
- 1) “Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
 - 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
 - 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

- 4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
 - 5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali dengan kepentingannya. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- c. Hak-hak anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak (Pasal 4 sampai dengan 18)
- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 7) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya.
- 8) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 9) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- 10) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri
- 11) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 12) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- 13) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 14) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan melibatkan dalam peperangan.

15) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

16) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

17) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

18) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

19) Setiap anak menjadi korban atau tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum berhak dirahasiakan.

20) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

d. Hak-hak anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 3 dan 4)

1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

- 2) Dipisahkan dari orang dewasa.
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional.
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya.
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- 11) Memperoleh advokasi sosial.
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi.
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- 14) Memperoleh pendidikan.
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan.
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17) Mendapat pengurangan masa pidana.
- 18) Memperoleh asimilasi.
- 19) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
- 20) Memperoleh pembebasan bersyarat.
- 21) Memperoleh cuti menjelang bebas.
- 22) Memperoleh cuti bersyarat.
- 23) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan secara umum Undang-undang tersebut mengemukakan bahwa oleh karena anak baik secara rohani, jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi gederasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak.¹⁹

¹⁹ Shanty Dellyana. *Op.cit*, hal. 49

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung jawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana

Pada pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana, Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan sebagai ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apakah pembuat yang telah melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) kemudian dapat dijatuhi pidana, sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana, sipembuat dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, apakah pembuat mempunyai kesalahan.²⁰

Asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah “Asas tiada pidana tanpa kesalahan”. Dalam bahasa lain disebut: “*Kiene Strafe Ohne Schuld*” (Jerman), atau “*Geen Straf Zonder Schuld* (Belanda); atau “*Nulla Poena Sine Culpa*”, “*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*” atau sering disingkat: *Mens sit rea* (Latin). “Culpa” di sini dalam arti luas, yaitu meliputi juga “Kesenjangan”. Asas ini secara singkat sering disebut “Asas Kesalahan”.²¹

Pada kesalahan mengandung adanya keadaan psikis (batin) tertentu. Dan adanya hubungan tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan celaan. Keadaan psikis sipembuat, dalam teori, merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaarheid*). Sementara itu, batin sipembuat, menyadari (menginsyafi), dalam arti menghendaki perbuatan tersebut, maka di sini ada keadaan (sikap) batin yang berupa “kesenjangan” (*dolus*). Sebaliknya apabila

²⁰ Sudaryono & Natanga Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, hal. 193

²¹ *Ibid*, hal. 194

sipembuat tidak menginsyafi, dalam arti tidak menghendaki perbuatan (secara yuridis), maka dalam hal ini sikap batin yang ada adalah berupa “Kealpaan” sikap batin sipembuat, untuk adanya kesalahan harus tidak ada alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).²²

Moeljatno yang berpendirian bahwa pemisahan antara keadaan batin sipembuat dengan perbuatannya adalah tidak mungkin. Kesenjangan atau kealpaan tidak dapat terfikirkan apabila tidak ada kemampuan bertanggungjawab atau tidak mempunyai kesalahan. Oleh karena itu untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:²³

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- 2) Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesenjangan atau kealpaan
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dianggap mempunyai kesalahan apabila ada unsur-unsur sebagai berikut:²⁴

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat, artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal;
- 2) Hubungan batin, sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan;

²² *Ibid*, hal. 206

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

- 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang melakukan suatu perbuatan (tindak pidana) dapat dinyatakan bersalah, sehingga dapat dijatuhi pidana.²⁵

1. Kemampuan bertanggungjawab

Pada dasarnya KUHP tidak memberikan rumusan dan penjelasan mengenai masalah dalam hal kemampuan bertanggungjawab, hanya menyebutkan title tentang “Tidak mampu bertanggungjawab”. Dalam MvT (Memori Penjelasan RUU WvS Belanda) juga tidak menyebut (merumuskan) tentang kemampuan bertanggungjawab secara negative (tidak mampu bertanggung jawab). Disebutkan dalam MvT, bahwa “tidak ada kemampuan bertanggung jawab sipembuat.”²⁶

- a) Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- b) Dalam hal ia suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Prof. Simons berpendapat bahwa “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai aturan keadaan psikis seseorang yang memberikan

²⁵ *Ibid*, hal. 207

²⁶ *Ibid*

adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”.²⁷

Dikatakan selanjutnya, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, apabila jiwanya sehat, yaitu apabila:²⁸

- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b) Ia mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Prof Van Hamel menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yaitu:²⁹

- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Van Bammelen menyebutkan bahwa seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya

dengan cara yang patut. Pendapat ini meski singkat tetapi belum memberikan kejelasan tentang makna mempertahankan hidup dengan cara patut. Menurut Roeslan Saleh untuk menentukan adanya kemampuan

²⁷ *Ibid*, hal. 208

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

bertanggungjawab itu ditentukan pertama-tama faktor alam yaitu jiwa yang normal, faktor kedua yaitu faktor kehendak bukanlah factor untuk menentukan mampu tidaknya orang bertanggungjawab. Faktor kehendak bukanlah faktor yang menentukan isi kemampuan bertanggungjawab, melainkan satu faktor dalam menentukan isi kemampuan bertanggungjaawab, melainkan salah satu faktor dalam menentukan kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab hanyalah salah satu unsur saja pada kesalahan.³⁰ Kemampuan bertanggungjawab dilihat dari KUHP tidak dapat memberikan rumusan tentang kemampuan bertanggungjawab. KUHP hanya memuat ketentuan yang ada hubungan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab. Ketentuan ini ada dalam Pasal 44 yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Ketentuan tersebut juga tidak memberikan pengertian atau batasan tentang seseorang yang tidak mampu bertanggungjawaban, tetapi hanya memberikan alasan tentang seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya . Alasan itu adalah berupa keadaan pribadi sipembuat yang bersifat biologis yaitu jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit. Apabila dikaitkan dengan rumusan MvT, maka kondisi bilogis (jiwa) yang cacat dari seseorang itulah

³⁰ *Ibid*, hal. 209

yang membuat ia tidak punya kebebasan kehendak dan tidak mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Kemampuan bertanggungjawab dalam pembaharuan hukum pidana (RUU KUHP) diatur dalam Pasal 34 RUU KUHP.³¹

“Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi (keterbelakangan) mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan”.

2. Cara menentukan kemampuan bertanggungjawaban

Cara menentukan kemampuan bertanggungjawab ada dalam Pasal 44 KUHP, apabila diteliti ada 2 (dua) hal yaitu:

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat.
- b. Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa sipembuat dengan perbuatannya.

Sistem yang dipakai KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya sipembuat adalah “Deskriptif-normatif”. Deskriptif maksudnya adalah menggambarkan keadaan jiwa sipembuat menurut apa adanya oleh seorang ahli (dokter kejiwaan). Normatif maksudnya adalah hakimlah yang menilai (menentukan), berdasarkan hasil pemeriksaan, sehingga dapat disimpulkan tentang mampu atau tidak

³¹ *Ibid*

mampunya terdakwa dalam mempertanggungjawabkan adalah suatu pengertian normatif.³²

Selanjutnya dalam usia berapa atau kapan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab. Moeljatno menjelaskan bahwa seseorang tidak mampu menyadari perbuatannya apakah sudah sesuai dengan hukum atau belum, dan tidak mampu menentukan kehendak atas perbuatannya. Dengan kata lain, seorang anak tidak dapat dianggap mampu bertanggungjawab, dengan demikian tidak dapat bertanggungjawab.³³

KUHP merumuskan dalam Pasal 45, di bawah titel “Belum umur 16 tahun” sebagai berikut: “Dalam menurut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan.”³⁴

- a. **Memerintahkan** supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun.
- b. **Memerintahkan** supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatannya merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut, dan putusan menjadi tetap.
- c. **Menjatuhkan Pidana**

³² *Ibid*, hal. 212

³³ *Ibid*, hal. 213

³⁴ *Ibid*, hal, 214

Pasal 45 KUHP ini pada intinya memberikan petunjuk bahwa apabila ada orang melakukan tindak pidana dan ia belum berumur 26 tahun, maka hakim dapat memberi keputusan kepada orang tersebut, yaitu berupa:³⁵

- 1) Menyerahkan kepada orangtuanya, walinya atau orang yang memeliharanya.
- 2) Menyerahkan kepada pemerintah.
- 3) Menjatuhkan pidana

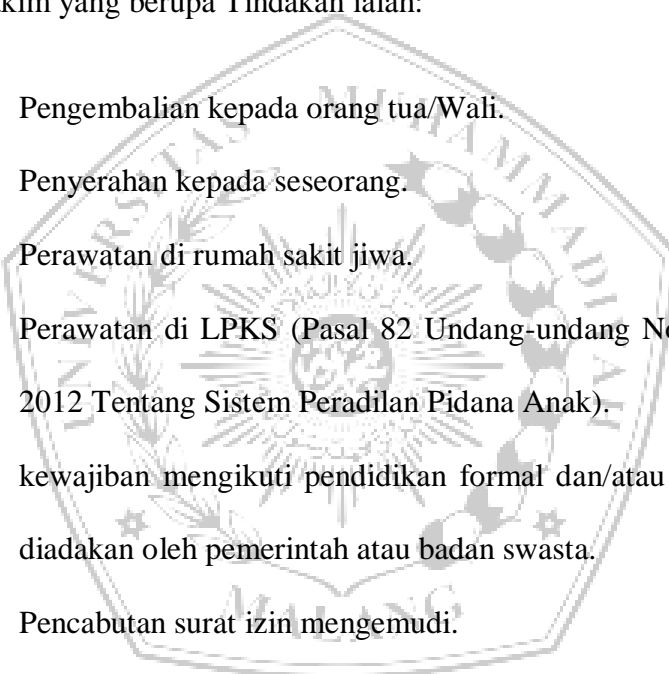
Dari ketentuan Pasal 45 KUHP dapat dikatakan bahwa seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan (dipersalahkan), dalam arti dijatuhi pidana, adalah “tidak ada batasan minimal”. KUHP hanya menyebutkan kalimat “orang belum cukup umur, yaitu sejak orang tersebut sudah mempunyai umur, yaitu sejak lahir. Dengan demikian, secara yuridis orang dapat dipertanggungjawabkan ketika ia sudah mulai hidup atau sejak lahir. Ketentuan KUHP tersebut sejak keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sudah dinyatakan tidak dicabut, Di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan, Pasal 1 angka 3 bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

³⁵ *Ibid*

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila anak belum berusia 14 (empat belas) tahun maka anak hanya dapat dikenai tindakan. Putusan yang dapat diberikan oleh hakim terhadap anak adalah berupa “pidana atau tindakan”. Putusan hakim yang berupa Tindakan ialah:

- 
- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali.
 - b) Penyerahan kepada seseorang.
 - c) Perawatan di rumah sakit jiwa.
 - d) Perawatan di LPKS (Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
 - e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
 - f) Pencabutan surat izin mengemudi.
 - g) Perbaikan akibat tindak pidana. (Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa anak dapat dipertanggungjawabkan (dipersalahkan) sejak umur 14 (empat belas) tahun. Hanya untuk dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti dapat dijatuhi pidana, anak minimal umur 14 (empat belas) tahun. Hal

ini dapat ditafsirkan dari Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengaturan tentang pertanggungjawaban anak dalam RUU KUHP secara tegas dinyatakan dalam Pasal 106, yang berbunyi:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Jadi menurut ketentuan RUU KUHP, anak baru dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipidana, yaitu ketika sudah berumur 12 (dua belas) tahun.

3. Kurang mampu dan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian

Berdasarkan uraian diatas dijelaskan bahwa orang dapat dinyatakan bersalah apabila ia mampu bertanggungjawab, sebaliknya apabila ia tidak mampu bertanggungjawab, maka ia tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan. Orang yang dalam keadaan ‘kurang mampu bertanggungjawab’ (*verminderde toerekeningsvat-baarheid*) tidak dirumuskan secara tegas dalam KUHP, namun dalam praktek diakui sebagai alasan untuk memperingan pembedaan.³⁶

³⁶ *Ibid*, hal. 217

Pada ilmu hukum pidana, terhadap orang yang dalam keadaan “kurang mampu bertanggungjawab” tetap dapat dianggap mampu bertanggungjawab. Dengan kata lain, orang tersebut dapat dipersilahkan terhadap perbuatannya dan dapat dipidana. Hanya keadaan “kurang mampu bertanggungjawab” tersebut dapat dijadikan sebagai faktor untuk memberikan keringanan (meringankan) dalam pemidanaan. Mengenai kurang mampu bertanggungjawab ini, untuk masa yang akan datang, menurut RUU KUHP, dinyatakan sebagai hal (faktor) yang meringankan dalam pemidanaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35, yang berbunyi:³⁷

“Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan”.

Jadi keadaan kurang mampu bertanggungjawab, masih ada keadaan yang disebut dengan “tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian ini dapat berupa penyakit kejiwaan, misalnya:³⁸

- a. *Kleptomanie*, yaitu penyakit jiwa yang berujud dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil bahan barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya terlarang.
- b. *Pyromanie*, yaitu penyakit jiwa yang berujud kesukaan untuk melakukan pembakaran barang tanpa alasan sama sekali.

³⁷ *Ibid*, hal. 218

³⁸ *Ibid*, hal, 219

- c. *Claustrophobie*, yaitu penyakit jiwa yang berujud rasa ketakutan untuk berada diruang yang sempit.

Orang yang dalam keadaan (mempunyai penyakit) tersebut diatas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sepanjang perbuatannya ada hubungan dengan penyakit tersebut.³⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kenakalan Remaja

Istilah *juvenile delinquency*, berasal dari *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sementara itu, *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain.⁴⁰

Kenakalan remaja adalah terjemahan kata "*juvenile delinquency*" dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan, ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia diantara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah.⁴¹

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Nashriana, *Op.Cit*, hal. 25

⁴¹ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hal. 56

Menurut **Sudarsono**, “suatu perbuatan dikatakan delikuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang antisosial yang ada di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normative.”⁴²

Menurut **Kusumanto**, “*juvenile delinquency* atau kenakalan remaja ialah tungkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai *acceptable* dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan”.⁴³

Menurut **Fuad Hassan**, yang dikatakan “*juvenile delinquency* adalah perbuatan antisosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan”.⁴⁴

2. Pengertian Kekerasan Seksual

Pada beberapa waktu belakangan ini sering sekali terdapat kasus mengenai tindak pidana kesusilaan yang meliputi tindakan perkosaan (kekerasan seksual) maupun terhadap anak di bawah umur, Yang lebih mengherankan lagi adalah tindak pidana kesusilaan sekarang bukan hanya lagi di lakukan oleh orang dewasa saja melainkan juga tindak pidana kesusilaan telah dilakukan oleh anak di bawah umur.

⁴² *Ibid*

⁴³ Sofyan.S Willis, 2008, “*Remaja dan Masalahnya*”, Bandung: Alfabeta, hal. 89

⁴⁴ Nashriana, *Op.Cit*, hal. 27

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan (kekerasan seksual) untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Sementara itu, dalam Undang-undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak di dalamnya diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan. Serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against huamanty*). Ada beberapa kata tentang kejahatan seksual yakni, “kejahatan”, “kekerasan dan tipe-tipe kekerasan”, “kekerasan seksual”, “perempuan”, “HAM”, “HAM Islam”, dan “hak asasi perempuan”, “hukum”, “hukum pidana Islam”, dan “hukum pidana Indonesia”.⁴⁵

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran islam.⁴⁶ Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual s atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.⁴⁷ sKejahatan kekerasan seksual dapat disebut juga sebagai perkosaan karena adanya persetubuhan yang dipaksakan, yang dilakukan

⁴⁵ Abdul Wahid dan Muhammalfan, *Op.Cit*, hal. 25

⁴⁶ *Ibid*, hal. 32

⁴⁷ *Ibid*

seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya.⁴⁸ Dalam hal ini kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana perkosaan.



⁴⁸ *Ibid*, hal. 45